

PERAN JURNALISME MELAWAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PROGRAM FJPP

Moehammad Gafar Yoedtadi¹, Fajar Hermawan²

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara
Surel: gafary@fikom.untar.ac.id

²Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara
Surel: fajar.915180015@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that lasted for quite a long time caused a decline in economic activity. The mass media business has been hit hard by the Covid-19 pandemic. Many press companies in Indonesia, both print, radio and online media have decreased revenues. Advertisers are drastically reduced, while operating costs remain high. On the other hand, there has been a flood of hoax information on Covid-19 which has hampered the government's handling of the pandemic. The role of the mass media is expected to assist the government in correcting various false information and socializing behavior changes according to health protocols. The Press Council and the Covid-19 Handling Task Force launched the Behavior Change Journalism Fellowship program (FJPP) with a dual purpose, to provide assistance to journalists whose media was affected by the economic recession and to mobilize press participation in reporting changes in health behavior in order to avoid exposure to Covid-19. About 3,030 journalists from various mass media in Indonesia participated in the FJPP program. However, not all of them have the quality of reporting that meets the criteria of the Press Council. For this reason, FJPP involved 26 senior journalists to become news editors. They are tasked with examining and assessing the feasibility of the participants' works by starting from the implementation of the Journalistic Code of Ethics and conformity with the theme of behavior change and the implementation of health protocols. The involvement of the editors aims to make the FJPP program not just a direct cash assistance (BLT) program for journalists. Because the editor is in charge of checking the appropriateness of thematic and journalistic ethics, as well as providing education to participants.

Keywords: Journalism, behavior change, FJPP, covid-19

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang berlangsung cukup lama menyebabkan turunnya kegiatan perekonomian. Tak terkecuali bisnis media massa ikut terpukul. Tak sedikit perusahaan pers di Indonesia, baik media cetak, radio maupun daring mengalami penurunan pendapatan. Pemasang iklan berkurang drastis, sementara biaya operasional tetap tinggi. Di sisi lain, terjadi banjir informasi hoaks Covid-19 yang menghambat penanganan pandemi oleh pemerintah. Peran media massa diharapkan membantu pemerintah dalam meluruskan berbagai informasi palsu dan menyosialisasikan perubahan perilaku sesuai protokol kesehatan. Dewan Pers dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meluncurkan program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) dengan tujuan ganda, memberi bantuan kepada para jurnalis yang medianya terdampak resesi ekonomi dan menggalang partisipasi pers memberitakan perubahan perilaku kesehatan dalam rangka menghindari paparan Covid-19. Sebanyak 3.030 jurnalis dari berbagai media massa di Indonesia ikut dalam program FJPP. Namun tak semua memiliki kualitas pemberitaan yang sesuai kriteria Dewan Pers. Untuk itu FJPP melibatkan 26 wartawan senior menjadi editor berita dimana penulis adalah salah satunya. Dengan demikian Dewan Pers adalah mitra penulis dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Editor bertugas memeriksa dan menilai kelayakan karya-karya para peserta dengan bertolak dari pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan kesesuaian dengan tema perubahan perilaku dan pelaksanaan protokol kesehatan.

Kata Kunci: Jurnalisme, perubahan perilaku, FJPP, covid-19

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga bagi media dan wartawan. Akibat bencana nasional yang berkepanjangan itu, bisnis media terpukul keras. Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 berdampak terhadap bisnis media. Tidak hanya media konvensional, media digital pun turut menderita. Pasalnya, angka pengunjung yang meningkat tajam tidak berbanding lurus dengan pendapatan iklan. Akibatnya industri media nyaris lumpuh. Pendapatan iklan merosot tajam. Lembaga survey Nielsen menghitung pendapatan iklan media turun 25% menjadi 3,5 triliun

rupiah pada minggu ketiga April 2020. Dan terus turun seiring dengan ancaman resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Nielsen.com, 2020).

Seperti dilaporkan Dewan Pers (2020), sejumlah media berskala menengah dan kecil dikabarkan sudah tak mampu menggaji wartawannya dan melakukan PHK. Serikat Perusahaan Pers (SPS) mencatat separo dari 400 anggotanya sudah mulai memotong gaji karyawannya. Demikian halnya dengan radio, sudah banyak yang berhenti siaran dan merumahkan karyawannya. Tak jauh berbeda nasibnya media daring yang sesungguhnya menjadi primadona di tengah pandemi Covid-19. Menurut Dewan Pers meski jumlah pengunjungnya naik, tapi secara bisnis mengalami kontraksi akibat kering iklan. Banyak pemasang iklan menahan dana promosi untuk mengantisipasi suramnya situasi ekonomi. Pandemi Covid-19 menjadi disrupsi kedua bagi bisnis media konvensional setelah serangan digitalisasi.

Dewan Pers yang merupakan lembaga independen dengan tugas pokok sesuai Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional memiliki keprihatinan melihat situasi tersebut. Oleh sebab itu Dewan Pers mengupayakan agar pemerintah ikut serta memberikan bantuan kepada media massa agar kesinambungan bisnis media dapat terjaga.

Di sisi lain, banjir informasi hoax mengenai Covid-19 kian menjadi-jadi. Pemerintah membutuhkan peran media massa arus utama untuk meluruskan dan menjernihkan situasi simpang siur akibat banyaknya hoax. Data Kemenkominfo menunjukkan bahwa sejak awal pandemi hingga 4 juni 2020, sebanyak 800 hoax Covid-19 tersebar melalui media sosial (Yoedtadi & Adina, 2020). Disinilah fungsi media massa arus utama dibutuhkan. Media massa arus utama dapat berperan tidak saja memberikan informasi yang benar, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan kesadaran protokol kesehatan masyarakat yang terhitung masih rendah. Pemberitaan media massa mengenai penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah, dan sosialisasi perubahan perilaku hidup sesuai protokol kesehatan dapat menjadi *agenda setting* media. Diharapkan *agenda setting* media yang dilakukan secara bersama-sama, mempengaruhi agenda publik berupa perubahan perilaku sesuai protokol kesehatan.

Pemikiran di atas didasari oleh teori *agenda setting* media yang digagas oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (2014). Teori ini menjelaskan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang menonjol yang dimiliki sebuah berita dari *news agenda* mereka kepada *public agenda*. Pada saatnya, media massa mampu membuat apa yang penting menurutnya, menjadi penting pula bagi masyarakat (Ritonga, 2018). McCombs dan Shaw mengatakan bahwa prioritas media berita menjadi prioritas publik. Teori ini menganggap apa yang dianggap penting oleh media pasti dianggap penting oleh publik atau khalayak. Dalam teori ini, media memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa yang seharusnya dipikirkan khalayak, dan bukan apa yang sebenarnya harus dipikirkan oleh khalayak. Akhirnya, apa yang diangkat oleh media dianggap penting dan menjadi agenda publik (Pamungkas dan Pramesti, 2021).

Bak gayung bersambut, persoalan bisnis media yang suram dan peran media dalam membantu pemerintah dalam menyosialisasikan perubahan perilaku kesehatan bertemu melalui sebuah program yang diinisiasi oleh Dewan Pers dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Melalui bagian Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pemerintah mencanangkan dua program besar sejak Oktober hingga Desember 2020. Program pertama merupakan kerjasama dengan 500 perusahaan media di seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan informasi penanganan Covid-19. Program kedua, Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP), ditujukan untuk individu jurnalis di seluruh Indonesia, terutama yang medianya terdampak secara ekonomi karena pandemi Covid-19. Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, sebagaimana dikutip Tempo (2021) mengatakan program FJPP merupakan momen langka dan bersejarah. Pemerintah berkomitmen membantu wartawan menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, media membantu pemerintah melakukan perubahan perilaku sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Tujuan dari penyelenggaraan FJPP (Ubah Laku.id, 2021) adalah menjadikan jurnalis sebagai garda depan perubahan perilaku masyarakat guna mencegah penularan Covid-19, menciptakan pemberitaan yang menaati Kode Etik Jurnalistik tentang perkembangan pandemi, turut memberikan solusi jangka pendek masalah industri pers nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan wartawan. FJPP memiliki tiga aktivitas utama (Ubah Laku.id, 2021). Pertama, mengajak wartawan menggalakkan pemberitaan pers berperspektif perubahan perilaku guna pencegahan penularan Covid-19. Kedua, memperkaya konten berita media yang menekankan pentingnya kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Ketiga, melibatkan wartawan sebagai agen perubahan perilaku melalui peningkatan peran pers sebagai institusi dengan fungsi edukasi publik dalam menghadapi bencana nasional.

Tugas wartawan peserta FJPP memberikan liputan berkelanjutan tentang pandemi Covid19 dengan menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan sebagai budaya baru di masyarakat, antara lain: penggunaan masker yang benar, cuci tangan, menjaga jarak sosial, olahraga dan melakukan vaksinasi. Untuk setiap karya berita, peserta akan mendapatkan tunjangan bulanan yang dialokasikan oleh APBN. Dewan Pers (2021) memastikan bahwa kompensasi ini tidak menghalangi pers melakukan kritik kepada pemerintah. Sikap kritis media terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 bebas dilakukan. Namun, hal tersebut tidak menghalangi media bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai kepentingan yang lebih tinggi yakni visi kemanusiaan membantu menyelamatkan masyarakat dari pandemi Covid 19 melalui sarana media dan informasi. Insentif ekonomi untuk jurnalis tidak diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai langsung, melainkan secara programatik dalam fellowship penulisan karya jurnalistik. Hal ini dinilai Dewan Pers lebih mendidik dan profesional.

Masalah Mitra Dan Solusinya

FJPP tahap pertama berlangsung dari Oktober hingga Desember 2020. Setelah melalui tahap evaluasi, FJPP tahap kedua dilanjutkan dari Mei hingga Desember 2021. Periode pertama Oktober-Desember 2020, FJPP diikuti oleh 5.084 peserta dengan tiga angkatan. Namun, berdasarkan evaluasi dan penilaian selama periode pertama, maka yang berhasil lolos seleksi tahap kedua hanya 3.030 peserta.

Tabel Peserta Program FJPP Periode II

No	Jenis Media	Jumlah	Persentase
1	Media Cetak	836	28%
2	Media Siber	1.405	46%
3	Media TV (Video)	697	23%
4	Media Radio (Audio)	92	3%

Sumber: FJPP

Para peserta periode kedua ini mengikuti program lebih panjang yakni 8 bulan sejak Mei-Desember 2021. FJPP periode pertama Oktober-Desember 2020 mampu memproduksi sebanyak 172.027 item berita, terdiri atas 836 item berita media cetak, 1.405 media siber, 92 berita radio, dan 697 berita televisi. Sementara jumlah berita pada periode kedua (Mei-November 2021) rata-rata mencapai 275.660 item berita, terdiri atas 68.704 item berita media cetak, 137,749 item media siber, 7.824 berita radio, dan 61,383 berita televisi. Jumlah berita tersebut menunjukkan betapa besarnya antusias media untuk turut terlibat dalam upaya melawan Covid-19.

Tabel Jumlah Berita Yang Masuk

No	Bulan	Jenis Media
----	-------	-------------

	Cetak	Siber	Televisi	Radio	Total Artikel
1 Mei	10,041	20,536	9,076	1,255	40,908
2 Juni	10,270	20,583	8,859	1,164	40,876
3 Juli	10,701	21,471	9,460	1,125	42,757
4 Agustus	10,312	20,170	9,222	1,113	40,817
5 September	9,847	19,196	8,843	1,084	38,970
6 Oktober	8,900	18,525	8,328	1,073	36,826
7 November	8,633	17,268	7,595	1,010	34,506
Total	68,704	137,749	61,383	7,824	275,660

Sumber: FJPP

Namun, tingginya gairah wartawan dalam mengikuti program FJPP tidak diikuti dengan kualitas pemberitaan yang layak. Tidak sedikit karya berita yang mutunya jauh dari harapan. Oleh sebab itu program FJPP melibatkan 26 wartawan senior dari berbagai latar-belakang media untuk menjadi editor. Salah satunya adalah penulis turut terlibat menjadi editor FJPP untuk berita televisi. Sebagai dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara dengan konsentrasi keilmuan pada bidang jurnalistik televisi, penulis diikutsertakan oleh Dewan Pers sebagai salah seorang editor FJPP. Penulis memasukkan aktivitas menjadi editor program FJPP sebagai pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan mitra Dewan Pers dan Satgas Penanganan Covid-19. Tugas penulis adalah melakukan kurasi terhadap berita-berita yang dikirimkan oleh para jurnalis peserta FJPP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap wartawan.

Para editor bertugas memeriksa dan menilai kelayakan karya-karya para peserta dengan bertolak dari pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan kesesuaian dengan tema perubahan perilaku dan pelaksanaan protokol kesehatan, serta memberikan edukasi kepada peserta. Meskipun angkanya tak terlampaui besar, tetapi jumlah berita yang ditolak editor menjadi catatan tersendiri perjalanan FJPP. Sebagai contoh pada September 2021 jumlah berita yang masuk 38.970 item. Berita yang diterima 37.022 item, berita yang diterima dengan catatan 1.527 item, dan berita ditolak 1.948 item. Jika dirata-rata per bulan berita ditolak mencapai 1.656 item. Berita yang diterima dengan catatan perbaikan rata-rata per bulan mencapai 1.462 item berita.

Tabel Jumlah Berita FJPP Yang Diterima dan Ditolak

No	Bulan	Status			Jumlah Artikel (Diterima + Ditolak)
		Diterima	Diterima dengan Catatan	Ditolak	
1	Mei	39,414	1,197	1,494	40,908
2	Juni	39,719	1,154	1,157	40,876
3	Juli	40,943	1,728	1,814	42,757
4	Agustus	38,583	1,967	2,234	40,817
5	September	37,022	1,527	1,948	38,970
6	Oktober	35,155	1,341	1,671	36,826
7	November	33,234	1,322	1,272	34,506

Sumber: FJPP

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Untuk mengatasi persoalan kelayakan berita tersebut, editor FJPP menyeleksi dengan ketat berita yang masuk. Editor FJPP juga memberikan catatan berupa saran perbaikan kepada wartawan untuk

meningkatkan kualitas karyanya. Namun, jumlah berita yang masuk sangat besar, tak sebanding dengan jumlah editor yang hanya 26 orang. Tak sedikit berita lolos tanpa kurasi editor. Dalam sebulan seorang editor minimal menyeleksi 360 item berita. Ini bukan pekerjaan mudah karena menuntut konsentrasi tinggi dan melawan kejenuhan.

Upaya memperbaiki kualitas berita tak hanya dilakukan dengan menuliskan catatan perbaikan. Para editor FJPP juga memberikan berbagai materi jurnalistik kepada peserta. Dewan Pers menyelenggarakan serial webinar berisi pemberian materi peningkatan kualitas berita bagi wartawan. Webinar terbagi dalam beberapa sesi, untuk jurnalis media cetak dan daring, jurnalis radio dan jurnalis audio-visual (TV). Penulis memberikan materi pelatihan jurnalistik wartawan televisi (audio-visual) dalam 2 sesi webinar kepada para jurnalis peserta FJPP. Yakni pada 23 Agustus 2021 dan 27 Oktober 2021.

Pada sesi webinar pertama, penulis memberikan materi produksi berita televisi (peliputan, pengambilan gambar, wawancara, *editing* dan pengemasan). Materi berisi Teknik peliputan oleh seorang wartawan televisi secara tunggal disebut *video journalist* atau *mobile journalist*. Kecanggihan peralatan rekam berupa kamera dan perangkat lunak di telepon genggam telah memungkinkan seorang wartawan audio-visual bekerja sendiri, dari menentukan objek liputan, mengambil gambar, wawancara narasumber, menulis naskah, mengisi narasi (*voice over*), menyunting berita dan memberi *sub-title* dapat dikerjakan tanpa bantuan orang lain. Materi ini diharapkan memperkaya keterampilan produksi berita para wartawan televisi.



Gambar 1. Webinar I Program FJPP, 23 Agustus 2021

Pada webinar kedua penulis memberikan materi dasar-dasar jurnalistik. Antara lain membahas kedudukan profesi wartawan terhadap kepentingan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Kovach dan Rosentiel (2006) bahwa salah satu dari sembilan elemen jurnalisme adalah loyalitas pertama jurnalisme kepada warga. Artinya, jurnalisme itu melayani kepentingan umum dan bukan kepentingan sekelompok orang tertentu atau bahkan melayani kekuasaan (Nurudin, 2009). Dengan demikian dalam memilih topik berita, wartawan harus mendahulukan kepentingan publik. Karena itu wartawan tak boleh hanya sekadar menjadi corong pejabat. Mengutip komentar pejabat atau memberitakan siaran pers humas menyalahi elemen loyalitas kepada warga.

Ketika meliput isu pandemi Covid-19, wartawan tak boleh melakukan liputan sebagaimana liputan pada umumnya. Karena pandemi Covid-19 adalah bencana nasional non-alam. Wartawan harus menggunakan prinsip jurnalisme bencana, jurnalisme kesehatan dan jurnalisme empati. Jurnalisme bencana menghindari eksploitasi horor, mengedepankan mitigasi dan pencegahan risiko. Jurnalisme kesehatan berpegang pada *evidence base reporting*, bukti-bukti ilmiah, memilih

sumber ahli kesehatan yang kompeten. Jurnalisme empati: mengambil sudut pandang korban, menghormati trauma korban, melindungi kepentingan korban.



Gambar 2. Webinar II Program FJPP, 27 Oktober 2021

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa persoalan yang kerap timbul berkaitan dengan kualitas berita peserta FJPP antara lain: berita kadaluwarsa, tidak memiliki perspektif ubah laku, kurangnya unsur berita, bukan karya sendiri, rendahnya kualitas karya berita dari sisi teknis (gambar, suara dan narasi). Khusus untuk berita televisi, ketidaksesuaian umumnya menonjol pada dua hal, aspek jurnalisme dan aspek teknis. Aspek jurnalisme menyangkut persoalan objektivitas berita antara lain keberimbangan, netralitas dan independensi. Sementara aspek teknis terlihat dari banyaknya berita yang tidak mengindahkan prosedur pengambilan gambar dan suara, teknik sunting berita yang tidak bagus.

Aspek jurnalisme menjadi penting karena menjadi dasar kelayakan sebuah berita. Salah satunya adalah persoalan objektivitas. Westerstahl (Yoedtadi et all, 2017) membagi objektivitas ke dalam dua kriteria, yakni faktualitas dan imparialitas. Faktualitas bisa diwujudkan jika didukung oleh sebuah kebenaran (*truth*) dan relevansi (*relevance*). Sementara itu, imparialitas hanya bisa ditegakkan jika didukung oleh keseimbangan (*balance*) dan netralitas (*neutrality*).

Nurudin (Yoedtadi et all, 2017) memaparkan bahwa faktualitas adalah bentuk reportase yang berkaitan dengan peristiwa dan pernyataan yang bisa dicek ke narasumber dan bebas dari opini. Karenanya faktualitas mensyaratkan adanya kebenaran (*truth*). Kebenaran adalah keutuhan laporan, tepat, akurat yang ditopang oleh pertimbangan independen, dan tak ada usaha mengarahkan khalayak. Sementara relevansi (*relevance*) berkaitan dengan proses seleksi, dan bukan penyajian. Proses seleksi yang dilakukan seorang wartawan memegang peranan penting apakah sebuah berita dikatakan berkaitan atau tidak. Sementara imparialitas mempunyai dua kategori yakni keseimbangan dan netral. Imparsialitas atau tidak memihak bisa dilakukan dengan peliputan *cover both side* (meliput dua sisi yang berbeda dengan seimbang). Meliput dua sisi atau banyak sisi yang berbeda tidak akan lengkap manakala tidak dilandasi dengan prinsip keadilan dalam meliputnya.

Tidak sedikit berita yang dibuat oleh peserta FJPP merupakan berita komentar (*talking news*), sekadar mengutip pernyataan pejabat seperti gubernur, bupati, aparat pemerintah atau tokoh masyarakat. Berita model ini tentu memiliki kelemahan karena hanya menonjolkan pendapat dari tokoh tanpa diimbangi sudut pandang kritis demi mencapai keberimbangan. Akibatnya, berita yang dihasilkan tak ada bedanya dengan siaran pers (*press release*) yang dibuat oleh petugas humas. Di sisi lain model berita ini acap kali tidak diperkaya dengan liputan tambahan. Wartawan

tidak melakukan pembuktian dengan turun meliput ke lapangan dan mewawancarai narasumber lain.

Penulis berpandangan bahwa di era digital, jurnalisme menghadapi tantangan besar dari media sosial. Kini publik dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, tidak hanya media massa arus utama tetapi lebih sering dari media sosial. Media massa tak lagi menjadi penjaga gerbang (*gatekeeper*) tunggal dalam arus informasi. Sehingga *agenda setting* media tak lagi mudah menentukan agenda publik. Dengan demikian tujuan program FJPP mengubah perilaku kesehatan masyarakat menghadapi persoalan serius.

Bruns (Prabowo dan Irwansyah, 2016) memberikan pandangan serupa bahwa pekerjaan *gatekeeping* yang dilakukan oleh media konvensional, mendapatkan tantangan baru di era media sosial. Sehingga seorang wartawan merasa perlu mengalihkan perannya dari *gatekeeping* menjadi pemantau informasi (*gatewatching*). *Gatekeeping* dianggap tak relevan lagi mengingat derasnya informasi yang menjadi agenda publik di media sosial. Namun, menurut penulis, dengan gerakan serentak seluruh media dalam memberitakan perubahan perilaku masyarakat, diharapkan agenda media bersama dapat mendorong terbentuknya agenda publik. Setidaknya program FJPP memberikan kontribusi terhadap pembentukan agenda publik dalam melawan Covid-19.

Sebagai editor, penulis mencatat hal yang patut diwaspadai, kecenderungan media massa arus utama mengambil isu yang tengah diperbincangkan oleh khalayak di media sosial. Padahal informasi tersebut belum tentu benar. Media massa arus utama justru memperkeruh situasi. Di tengah suasana seperti itu, media arus utama sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi (*clearing house*), yaitu media yang menyajikan informasi-informasi yang terverifikasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

FJPP merupakan program monumental karena menorehkan prestasi berupa kerja sama media, jurnalis dan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Sayangnya gairah keikutsertaan wartawan dalam program FJPP ternyata tak diimbangi dengan karya berita yang sesuai dengan kriteria Dewan Pers. Cukup banyak berita yang dinilai tidak memenuhi standar Kode Etik Jurnalistik dan tema perubahan perilaku pelaksanaan protokol kesehatan. Editor FJPP mencatat kekurangan-kekurangan dalam hal teknis berita dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Editor FJPP berharap, catatan tersebut hendaknya ditindak-lanjuti dengan berbagai pelatihan dan pengawasan oleh Dewan Pers.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada Dewan Pers, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, seluruh editor FJPP, seluruh peserta FJPP atas kerja sama dalam melaksanakan program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku.

REFERENSI

- Dewan Pers. (2021). *Dewan Pers Apresiasi Fellowship Jurnalisme Ubah Laku*.
https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/2021-05-11_Dewan_Pers_Apresiasi_Fellowship_Jurnalisme_Ubah_Laku-release_formal.pdf
- Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom. (2006). *Sembilan elemen jurnalisme (apa yang seharusnya diketahui wartawan dan diharapkan publik)*. Pantau, Jakarta
- McCombs, Maxwell E & Shaw, Donald L & Weaver, David H. (2014). New directions in agenda-setting theory and research. *Mass Communication and Society*, 17(6), 781-802
- Nielsen.com. (2021). *Covid-19 dan dampaknya pada tren konsumsi media*.
<https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/covid-19-dan-dampaknya-pada-tren-konsumsi-media/>

- Nurudin. (2009). *Jurnalisme masa kini*. Rajawali Press, Jakarta
- Pamungkas, Andreas Tri & Pramesti, Olivia Lewi. (2021). Kebijakan redaksional media lokal di Yogyakarta (Studi kasus kebijakan redaksional di harian jogja dan tribun dalam pemberitaan covid-19). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 25(2), 87-199
- Prabowo, Myabi & Irwansyah. (2016). Trending Topics Vs Agenda-Setting: Pengaruh Trending Topics Politik sebagai Reverse Agenda-Setting dan Haluan Politik Pemilik Terhadap Berita Politik di Televisi. *Jurnal Komunikasi Indonesia*. 5(1), 165-180
- Rintonga, Elvi Yanti. (2018). Teori agenda setting dalam lmu komunikasi. *Simbolika*, 4(1), 32-41
- Tempo. (2021). *Dewan Pers Lanjutkan Program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku*. <https://nasional.tempo.co/read/1461644/dewan-pers-lanjutkan-program-fellowship-jurnalisme-perubahan-perilaku>
- Ubah Laku Id. (2021) <https://ubahlaku.id/home>
- Yoedtadi, Moehammad Gafar & Adina, Amrita. (2021). Role of Public Relations to Prevent Hoaxes Case Study of Instagram @Kemenkominfo. *Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021)*. Atlantis Press, 679-684
- Yoedtadi, Moehammad Gafar & Pribadi, Muhammad Adi. (2017). Upaya redaksi televisi menjaga objektivitas dalam pemberitaan pilkada dki Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 275-285